



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI KARYADI RIYANTO RAHARJO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 83753

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/140 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 242.200.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. LAINNYA, PHOLIGON SEPEDA TAK BERMESIN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. LAINNYA, PHOLIGON SEPEDA TAK BERMESIN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
7. LAINNYA, PHOLIGON SEPEDA TAK BERMESIN Tahun 2020, HADIAH Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.490.898.906



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.375.098.906
III. HUTANG	Rp.	60.695.440
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.314.403.466

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.